

**PENGEMBANGAN DESA WISATA KOPI BERBASIS PARTISIPASI
MASYARAKAT LOKAL DI DESA COLOL LAMBA LEDA TIMUR
MANGGARAI TIMUR**

Ferliana Yastatin

Program Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra

ferlianayastatin@gmail.com

Abstrak

Desa Wisata merupakan suatu tempat yang memiliki ciri dan nilai tertentu sebagai daya tariknya, baik tentang kehidupan pedesaan maupun keunikan atau kekhasannya. Pemanfaatan kekayaan alam dan kebudayaan juga menjadi daya tarik tersendiri. Selain itu Desa Wisata merupakan Desa yang memiliki kemandirian karena potensi alam telah dikelola secara tepat dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara baik, bukan saja sebagai inisiasi pembangunan tapi juga dalam permasalahan. Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam keseluruhan tahap pengembangan mulai tahap perencanaan, implementasi, dan pengawasan. Akan tetapi, dalam realitas sering terjadi pengabaian partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah Desa colol di kecamatan Lama Leda Timur yang sejak lama dikenal sebagai daerah penghasil kopi akhirnya diterapkan sebagai desa wisata berbasis kopi.

Adanya upaya pengembangan desa wisata juga dilatarbelakangi adanya keinginan pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa dimana masih banyak desa yang berstatus desa tertinggal. partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, tenaga, uang, serta musyawarah dan gotong royong untuk meningkatkan kualitas Desa sebagai upaya dalam pengembangan Desa Wisata yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata, serta adanya tingkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan seperti memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama dan memberikan dukungan. Proses pengembangan desa wisata dalam prakteknya menghadapi berbagai permasalahan, secara umum permasalahan yang terjadi yaitu tidak dioptimalkannya peran masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya merasa kurang memiliki rasa bangga terhadap pariwisata yang ada di desanya, tetapi juga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari adanya kegiatan pariwisata yang ada di desa.

Kata Kunci: Pengembangan Desa Wisata, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

Tourism Village is a place that has certain characteristics and values as its attraction, both about rural life and its uniqueness or uniqueness. Utilization of natural and cultural wealth is also the main attraction. In addition, the Tourism Village is a village that has independence because the natural potential has been managed properly by involving community participation properly, not only as a development intervention but also in problems. The development of a tourist village requires the participation of local communities in all stages of development starting from the planning, implementation, and supervision stages. However, in reality there is often a neglect of community participation. One of them is Colol Village in the Lama Leda Timur sub-district, which has long been known as a coffee-producing area, finally being implemented as a coffee-based tourism village.

The existence of tourism village development efforts is also motivated by the government's desire to empower and improve the economy of rural communities where there are still many villages that have the status of underdeveloped villages. community participation in the form of thoughts, energy, money, as well as deliberation and mutual cooperation to improve the quality of the village as an effort to develop a tourism village carried out by the community in developing a tourism village, as well as the level of community participation carried out such as providing information, consultation, joint decision making, act together and provide support. The process of developing a tourist village in practice faces various problems, in general the problems that occur are not optimizing the role of the community, so that people not only feel less proud of the tourism in their village, but also the community does not benefit from the existence of tourism activities in the village. village.

Keywords: Tourism Village Development, Community Participation.

Pendahuluan

Desa Colol terletak di Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Desa colol adalah sebuah desa dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Poco Nembu. Suhu udara di desa ini sangatlah dingin sehingga udara di sini tergolong sejuk. Topografi desa ini berbukit-bukit sehingga banyak hasil pertanian sebagai lahan utama penghidupan penduduk. Perkebunan kopi dan produksi kopi yang ada saat ini masih belum maksimal karena pengelolaan kopi belum dilakukan secara efektif di kawasan wisata. Komoditas kopi ini diharapkan akan bernilai tinggi jika diintegrasikan dengan keindahan Kawasan air terjun yang mempesona sehingga mempunyai daya tarik kuat sebagai agrowisata. Potensi pariwisata kopi seharusnya dapat dioptimalkan salah satunya melalui pengembangan wisata kopi berbasis masyarakat di kawasan Desa Colol. Upaya tersebut meliputi pembinaan masyarakat dalam mewujudkan sinergitas pariwisata dengan pertanian yang dapat menghasilkan pertumbuhan sosial, ekonomi dan organisasi masyarakat

Wisata kopi dibuat selain untuk memenuhi fungsi utamanya sebagai kebutuhan hidup, juga merupakan cermin dari bertahannya kebudayaan lokal, khususnya bertahannya sistem mata pencaharian di bidang pertanian. Selain itu, Kondisi alam Desa wisata colol yang masih asri, kebun kopi yang tubuh subur berteras yang tertata rapi menjadi daya tarik utama desa ini. Selain keindahan tanaman kopi, sumber daya alam dan budaya yang berpotensi untuk dijadikan atraksi wisata, misalnya, bentuk pemukiman penduduk dengan tataanya, air terjun, kesenian khas adat istiadat seperti mbata, ndundu ndake, hang woja,dsb, dan wisata kuliner khas di desa wisata colol bernama Teko Da'ul di hidangkan dengan kopi pahit asli khas desa colol menambah pesona Desa Colol sebagai daerah wisata.

Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata belum berpihak kepada masyarakat Colol. Contohnya, kopi dan petani merupakan aset pariwisata yang dijual untuk kepuasan wisatawan. Namun, pengembangan desa wisata tidak berpihak kepada kehidupan petani. Petani tetap miskin sementara investor meraup keuntungan besar dari aktivitas pariwisata ini. Padahal, jika tidak ada kopi dan petani pariwisata di Desa Colol tidak akan berkembang. Desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata menjadikan produk wisata lebih bernilai budaya pedesaan sehingga pengembangan desa wisata bernilai budaya tanpa merusaknya.

Suatu desa dalam prosesnya untuk dikembangkan menjadi desa wisata memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah desa, masyarakat maupun pihak swasta yang dalam hal ini penanam modal harus bersinergi satu sama lain. Ketiga pihak harus memiliki persamaan preferensi mengenai pengembangan potensi yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan beserta dengan segala implikasinya apabila dikembangkan menjadi desa wisata. Pemerintah desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam penyelenggaraan pembangunan tingkat desa tidak hanya harus mampu mensinergikan berbagai kebijakan pembangunan dengan pengembangan wisata yang ada, tetapi juga harus mampu mengakomodasi pengembangan desa wisata tersebut sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.

Inskeep (1991) mengatakan bahwa desa wisata merupakan bentuk pariwisata, yang sekelompok kecil wisatawan tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa-desa terpencil dan mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat. Nuryanti (1992) mendefinisikan desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditegaskan pula bahwa komponen terpenting dalam desa wisata, adalah akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/ unit-unit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan atraksi, yakni seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif, seperti kursus tari, bahasa, lukis, dan hal-hal lain yang spesifik.

Tinjau Pustaka

Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dalam Dictionary of Sociology “Social Participation”, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang ikut merasakan bersama-sama dengan orang lain sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial. Partisipasi menurut Keith Devis, adalah suatu mental dan emosi seseorang kepada pencapaian-pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Atau secara umum partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan, pelaksanaan upaya

mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat seharusnya berlangsung secara sukarela dan adanya keberlanjutan. Partisipasi yang di maksud adalah partisipasi yang memandang masyarakat sebagai subjek dari segala aturan pembangunan bukan sebagai objek pembangunan. Pelibatan masyarakat ini secara utuh dilakukan melalui pola pikir pembangunan yang memandang masyarakat sebagai subjek peraturan dengan keanekaragaman perilaku. Proses pelibatan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang yang akan muncul suatu sistem evaluasi dari kegiatan pengembangan pembangunan yang telah dilakukan dan menjadi masukan bagi proses pengelolaan pembangunan selanjutnya.

Pengertian Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan, pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki. Pengembangan yang berarti suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral. Edwin B. Flippo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut: Pendidikan berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh, sedangkan Andrew F.Sikula mendefinisikan pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum.

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Menurut Priasukmana dan Mulyadin , Desa wisata merupakan suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk di kembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cindramata, dan kebutuhan wisata lainnya.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan adalah keterlibatan dalam identifikasi masalah, perumusan tujuan, dan pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Tulisan ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jatiluwih mengaku tidak

dilibatkan dalam identifikasi masalah dan tidak ikut terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan desa wisata. Mereka tidak pernah diajak berdialog dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini terjadi, karena gagasan pengembangan desa wisata dilakukan oleh Pemerintah Desa Colol tanpa melibatkan masyarakat sebagai pemilik sumber daya, sehingga masyarakat Colol kurang memahami latar belakang pengembangan desa wisata masyarakat lokal hanya menjalankan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, misalnya, kesediaan menerima kedatangan wisatawan dan menyerahkan lahan untuk dibangun fasilitas wisata masyarakat lokal tidak berkekuatan untuk berpartisipasi aktif dalam arti ikut memberi warna terhadap keputusan yang akan diambil oleh penguasa.

Pada tahap ini, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tergolong semu. bentuk partisipasi yang dilakukan tidak menunjukkan hasil yang signifikan, bahkan umpan balik yang disampaikan oleh masyarakat lokal atas keputusan yang diambil oleh penguasa sering diabaikan. Padahal substansi dalam pengembangan desa wisata berbasis masyarakat, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Colol seharusnya bersifat aktif dan langsung. Dalam hal keaktifan masyarakat Desa Colol, hasil penelitian menemukan bahwa kehadiran warga dalam pertemuan desa cukup antusias. Walaupun warga masyarakat banyak yang hadir dalam setiap pertemuan, pada umumnya mereka mengaku tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perihal pengembangan desa wisata. Dalam hal keterwakilan masyarakat pada rapat-rapat, biasanya perangkat desa hanya mengundang beberapa warga yang merupakan perwakilan tiap-tiap banjar.

Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Implementasi

Partisipasi masyarakat dalam tahap implementasi adalah keterlibatan di dalam pengelolaan usaha-usaha pariwisata, misalnya, sebagai pengelola penginapan pengelola rumah makan, pemandu wisata, dan pengelola atraksi wisata. Keterlibatan masyarakat lokal dalam tahap implementasi dalam arti pemanfaatan peluang terlihat minim. Sekalipun wujud partisipasi itu ada, bentuknya lebih pada pengelolaan usaha berskala kecil. Penyebabnya adalah karena peluang usaha tersebut memerlukan modal besar, risiko bisnis yang tinggi, persaingan ketat, dan menuntut kompetensi yang tinggi. Masyarakat Colol dengan kompetensi bisnis yang rendah dan keterbatasan modal menyebabkan mereka tidak mampu bersaing dengan para pemilik modal besar yang umumnya berasal dari luar desa. Ironisnya, para pemilik modal besar tidak hanya menekuni usaha berskala besar, juga mengambil alih usaha berskala kecil yang pada mulanya dikelola masyarakat lokal. Akibatnya, sebagian besar hasil usaha-usaha tersebut tidak terdistribusi di tingkat lokal melainkan mengalir keluar desa. Intervensi modal asing yang merambah sampai wilayah pedesaan, menyebabkan

terjadinya proses marginalisasi posisi sosial ekonomi masyarakat Colol. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan desa wisata belum bermanfaat ekonomis bagi masyarakat Colol.

Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Tahap Pengawasan

Masyarakat lokal memiliki peran kontrol yang sangat substansial dalam pengembangan desa wisata karena kontrol terhadap proses pengambilan keputusan harus diberikan kepada mereka yang nantinya menanggung akibat pelaksanaan pengembangan termasuk kegagalan atau dampak negatif yang terjadi akibat pengembangan desa wisata. Oleh karena itu, kewenangan pengambilan keputusan harus diberikan kepada masyarakat lokal. partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah keterlibatan dalam tim pengawasan berikut kewenangan yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keterlibatan masyarakat lokal dalam melakukan pengawasan terhadap pengembangan desa wisata terlihat minim. Alasannya, karena perencanaan pengembangan dilakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak berkompotensi untuk melakukan pengawasan, di samping itu pengawasan oleh masyarakat dimaknai oleh pemerintah sebagai tindakan memata-matai program yang dilakukan pemerintah sehingga berujung terjadinya konflik. Selama ini pengawasan yang bersifat kompleks hanya dilakukan oleh segelintir masyarakat yang kritis termasuk elite masyarakat lokal.

Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata pada prinsipnya adalah partisipasi dalam mengelola sumber daya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan model yang relevan dalam pelaksanaan program tersebut. Model dipandang sebagai acuan dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi program. Sebagai sebuah pendekatan, model yang dirumuskan harus merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam setiap aspeknya. Harapan masyarakat colol dalam pengembangan desa wisata kedepan adalah masyarakat harus terlibat penuh dalam pengembangan desa wisata menghargai hak-hak masyarakat local memperhatikan kelestarian lingkungan yang ada di sekitar Desa Colol pemanfaatan rumah penduduk untuk akomodasi wisatawan ada kelembagaan otonom dan mandiri yang dibentuk oleh masyarakat lokal dibawah tanggung jawab desa adat.

Usaha pengembangan desa wisata kopi salah satunya yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wisata Kopi, masyarakat sangat aktif dan mendukung dalam setiap kegiatan pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan, akan tetapi dalam pengembangan Desa Wisata belum semua warga ikut berpartisipasi didalamnya, sebagian besar warga berusia dewasa yang berpartisipasi

sedangkan remaja/pemuda hanya sedikit yang terlihat berpartisipasi. Seperti kegiatan menanam jenis bibit kopi, bersih disekiling pohon kopi.

Metode penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Colol dan Kecamatan Lamba Leda Timur-Manggarai Timur. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut telah melakukan budidaya kopi yang sesuai di ketinggian daerah, yaitu jenis kopi robusta dan arabica, sehingga berpotensi untuk dijadikan agrowisata dan sedang menjadi kawasan rencana pengembangan agrowisata berkelanjutan berbasis kopi oleh pihak pemerintah dan masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah pengumpulan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data melalui wawancara, dan berbagai sumber dari media untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pengelolaan Desa Wisata.

Hasil Dan Pembahasan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata

Konsep partisipasi biasa digunakan dalam kajian menyangkut peranan anggota masyarakat baik secara formal maupun nonformal. Partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat pada suatu kegiatan. Verhagen (dalam Poerwoko, 2015:83) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Lebih lanjut, analisis tentang modal sosial terhadap maksud yang penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan menunjukkan bahwa partisipasi dibutuhkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pada kegiatan pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat ialah perwujudan akan kesadaran serta kepedulian dan tanggungjawab masyarakat tentang pentingnya pembangunan yang bermaksud untuk memperbaiki Kualitas hidup mereka, artinya dengan melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari jika kegiatan pembangunan bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah sendiri akan tetapi juga harus menuntut keterlibatan masyarakat yang juga akan diperbaiki kualitas hidupnya.

Partisipasi masyarakat selanjutnya akan menyebabkan keterlibatan masyarakat secara khusus dalam mengikuti perubahan yang semakin nyata. Adanya perasaan ikut berpartisipasi dan mamiliki dari masyarakat menunjukkan adanya komunikasi antara masyarakat dan lautan didalam mencapai sebuah tujuan yang diharapkan masyarakat sebanyak mungkin untuk ikut

serta ataupun berperan aktif dengan pemerintah guna menjamin keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Partisipasi disini juga bisa berupa partisipasi hasil pikiran atau ide, partisipasi tenaga atau keterampilan, partisipasi sosial serta partisipasi dalam pelaksanaan program. Jadi, Dari partisipasi ini ada banyak hal yang dapat diperoleh, diantaranya rasa tanggungjawab, rasa kompetisi dan solidaritas. Penelitian ini bertujuan mengkaji keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata dan merumuskan model pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan, padahal bila mengacu pada pendekatan tata kelola pemerintah yang bersih dan berkelanjutan peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Diperlukan kemauan politik pemerintah untuk mengurangi perannya dalam pengembangan desa wisata dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat merupakan partisipasi yang aktif, baik dalam dalam perencanaan objek wisata yaitu pelibatan masyarakat dalam perencanaan pengembangan objek wisata yang merupakan perhatian pertama yang harus diambil oleh pihak pemerintah selaku penggagas objek wisata untuk melihat sejauh mana apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ini, kemudian pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan objek wisata yaitu setelah membahas dan sudah memiliki keputusan yang jelas tentang pengembangan objek wisata tersebut maka perlu dipetakan untuk memperjelas siapa pihak yang akan mengelola dan melakukan pelayanan di setiap pembagian kerja, serta pengawasan dan evaluasi dalam program pengembangan objek wisata yaitu banyak pihak yang dilibatkan dalam pengembangan objek wisata terlebih karena ini adalah gagasan pemikiran dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, agar objek wisata ini tetap berjalan dengan baik sesuai harapan dari berbagai pihak maka diperlukan pengawasan yang baik dan melihat sejauh mana tingkat kemajuannya. Partisipasi masyarakat dibidang sarana dan prasarana adalah partisipasi masyarakat dengan melihat kesediaan sarana transportasi yang merupakan tolak ukur utama yang harus dipikirkan oleh pihak pemerintah dalam menciptakan kebijakan pembuatan objek wisata ini dengan melihat sejauh mana penyediaannya agar mudah dijangkau oleh pengunjung. Kesediaan prasarana adalah sebuah kemunculan ide apapun bentuknya agar pengunjung lebih tertarik untuk datang disamping memikirkan letak strategis tempat wisata yang disediakan dan menjadi kebutuhan para wisatawan terhadap tempat wisata tersebut.

Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

Peran menurut Wulansari (2009) diartikan sebagai konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat, sejalan dengan pengertian tersebut Paul dan Chester (1993) mengartikan peran sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status. Pemahaman peran masyarakat tersebut dalam konteks pengembangan desa wisata memiliki artian sebagai adanya kesamaan pola pikir maupun pola tindak dari masyarakat perdesaan mengenai potensi wisata yang ada di desanya, untuk kemudian masyarakat tersebut secara bersama-sama melakukan suatu tindakan dalam upayanya untuk mewujudkan tujuan pengembangan pariwisata sebagai sebuah dimensi yang mampu memberikan dampak positif bagi mereka, serta mampu mencerminkan identitas mereka sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki struktur sosial yang khas atau unik. Peran masyarakat sebagai penyerta yang mana masyarakat turut serta dalam proses pengembangan Desa wisata, namun bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengembangan Desa wisata, melainkan turut berpartisipasi sebagai salah satu aktor atau pelaku pengembangan wisata.

Masyarakat lokal sebagai pihak yang menerima kedatangan pengunjung, perlu dilibatkan dalam proses pengembangan Desa wisata, supaya keberhasilannya lebih terjamin. Berbagai peran dapat dilaksanakan oleh masyarakat setempat dalam pengembangan Desa wisata di daerahnya. Peran yang dimaksud adalah:

1. Menjadi pemandu wisata
2. Menjadi pelaku usaha Desa wisata
3. Mempromosikan Desa Wisata

Peranan masyarakat dalam pengembangan adalah melalui perilakunya tentang kesadaran setiap warga masyarakat untuk merasa bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata tersebut. Dalam hal perencanaan pembangunan objek wisata perwakilan masyarakat sangat menyambut baik dengan adanya objek wisata ini. Partisipasi masyarakat dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam perencanaan kebijakan yang telah diciptakan oleh pihak swasta untuk membangun tempat wisata adalah bentuk hal penting.

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Desa wisata yaitu tindakan setelah membahas dan sudah memiliki keputusan yang jelas tentang pengembangan objek wisata tersebut maka perlu dipetakan untuk memperjelas siapa pihak yang akan mengelola dan melakukan pelayanan disetiap pembagian. Berdasarkan wawancara bahwa pengembangan Desa wisata dalam hal ini melibatkan semua lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa

diharapkan turut membantu dan menunjang keberhasilan pengembangan Desa wisata. Dilihat dari sisi partisipasi masyarakat, strategi ini lebih memungkinkan timbulnya keikutsertaan masyarakat, Pemerintah Desa Colo Lamba Leda Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk memajukan Desa wisata Colol yaitu mulai dari pengelolaan dan pelayanan telah melibatkan masyarakat secara luas. Pihak pemerintah desa secara tidak langsung bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari setiap masyarakat yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mengembangkan tempat wisata ini. Masyarakat telah membagi diri untuk bersama-sama menciptakan hal-hal baru dan berusaha untuk mempertanggung jawabkannya dengan baik.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa wisata memiliki beberapa pembagian atau bentuk-bentuk partisipasinya. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yaitu di bidang sarana dan prasarana serta di bidang promosi. Partisipasi Masyarakat di Bidang Sarana dan Prasarana. Partisipasi masyarakat dibidang sarana dan prasarana adalah partisipasi masyarakat dengan melihat kesediaan (a) sarana transportasi dan (b) prasarana tempat lainnya yang disediakan oleh pihak pengelola Desa wisata Colol Kabupaten Manggarai Timur.

Tersedianya Sarana, unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat sekitar tempat wisata dalam setiap aspek yang ada di tempat wisata tersebut. Pengembangan tempat wisata sebagai penjabaran dari konsep pariwisata inti yang mengandung arti bahwa masyarakat desa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan Desa wisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diluar keluar kegiatan sehari-harinya. Pihak pengelola telah merancang dengan baik seluruh akses berdasarkan kebutuhan masyarakat meskipun itu belum terlalu sempurna karena setidaknya ketersediaan akses untuk tempat ini sudah baik sehingga dapat menarik minat pengunjung.

Tersedianya Prasarana, partisipasi masyarakat di bidang prasarana adalah partisipasi masyarakat untuk penyediaan tempat. Unsur penting dalam pengembangan kawasan wisata adalah keterlibatan masyarakat sekitar tempat wisata dalam setiap aspek yang ada di tempat wisata tersebut. Pengembangan tempat wisata sebagai penjabaran dari konsep wisata inti yang mengandung arti bahwa masyarakat desa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata dalam bentuk pemberian jasa dan pelayanan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diluar keluar kegiatan sehari-harinya.

Partisipasi Masyarakat di Bidang Promosi Desa Wisata, promosi lisan adalah hal yang dilakukan oleh masyarakat selaku kegiatan partisipan untuk melakukan tindakan memperkenalkan Desa wisata melalui sosialisasi atau apapun yang bukan dalam bentuk tulisan. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja ditempat wisata. “Setelah mendapat izin pembangunan dari pemerintah saya sudah banyak melihat banyak postingan dari pihak pengelola terkait serta masyarakat dimedia sosial untuk mempromosikan tempat ini dengan berbagai macam kreasi wacana “ (hasil wawancara dengan petugas di tempat wisata, 13 november 2021).

Promosi Tulisan, promosi tempat wisata dianggap sebagai rencana atau strategi yang wajib untuk dilaksanakan sebagai modal investasi kedepannya. Terkadang tindakan promosi dianggap hal yang biasa dan terkadang ada pihak yang sedikit lupa untuk tindakan ini. Berikut adalah wawancara dengan masyarakat selaku pekerja di tempat wisata antara lain : “ Ada beberapa strategi yang pihak pengelola lakukan untuk mempromosikan tempat ini seperti pemasangan spanduk. (hasil wawancara dengan petugas di tempat wisata, 13 november 2021).

Penutup

Partispasi yang dilakukan dalam pengembangan desa wisata dilakukan melalui kegiatan musyawarah gotong royong dan sumbangan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata dimulai dari partisipasi dalam bentuk pikiran, tenaga, uang atau harta benda. Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran dilakukan dengan musyawarah melibatkan perangkat desa dan masyarakat. Dilakukan sistematis namun masyarakat belum berperan aktif dalam kegiatan pengembangan desa wisata karena masyarakat belum memiliki keterbukaan dalam menyampaikan ide pokok gagasan dalam perencanaan kegiatan, partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dilakukan dengan gotong royong secara rutin melibatkan seluruh masyarakat desa Colol. Tingkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata sudah berjalan dengan cukup baik, dilihat dari kekompakan Aparat Desa dan masyarakat dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan, bertindak bersama, dan memberikan dukungan serta masyarakat yang antusias dan sukarela dalam proses menjadikan Desa tersebut menjadi Desa Wisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha Patria Putri, "Strategi Pengemangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Limbasari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga". Universitas Diponegoro Semarang, 2017 Diadopsi dari web.
- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113.
- Atmosoedirdjo, Prajudi, Dasar-dasar Ilmu Administrasi, Seri Pustaka Ilmu Adm, Jakarta
- Aida, Nur Rohmi (2019) Sabtu, 13 juli 2019 10.02 WIB. KOMPAS.com. 7 Hutan Mangrove di Indonesia, Pelindung Abrasi yang Wajib Dikunjungi. Diakses <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/travel/read/2019/07/13/100200527/7-hutan-mangrove-di-indonesia-pelindung-abrasi-yang-wajib-dikunjungi>
- Batam.news. (2018). Laguna, UKM dan Masyarakat Gagah Wisata Kelas Dunia di Bintan. Diakses: <http://batamnews.co.id/berita-28945-laguna-ukm-dan-masyarakatgagas-wisata-kelas-dunia-di-bintan.html>
- Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Fajar Interpratama Offset, Jakarta: 2007).
- Bustomi, Y., Ramdhani, M. A., & Cahyana, R. (2012). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Sebaran Tempat Riset Teknologi Informasi di Kota Garut. *Jurnal Algoritma* 9(1), 1-7.
- CCN Indonesia (2019) Rabu, 20/03/2019 16:34 WIB Meneropong' Ekowisata di Indonesia. Di akses <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190320161452-269-379113/meneropong-ekowisata-di-indonesia>. Pada 20 Januari 2020.
- CIFOR dan Indonesia (2015). Kemitraan untuk hutan dan manusia. Diakses: www.cifor.org >BCIFOR1402PDF Hasil web CIFOR dan Indonesia
- Conyers, Dana, Perencanaan Di Dunia Ketiga, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Charles Lindblom dalam buku Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Christiyanto, F., Nurfitriyah, & Sutadji. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015. *eJournal Administrative Reform*, 4(2), 291-300.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(2), 110-125.
- Diansari, R. E. (2016). *Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi pada Desa Pateken Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung Jawa Tengah*. Yogyakarta: Universitas PGRI Yogyakarta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Farida, R., & Ramdhani, M. A. (2014). Conceptual Model of the Effect of Environmental Management Policy Implementation on Water Pollution Control to Improve Environmental Quality. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 3(10), 196-199.
- Freeman, R. (2006). Learning in Public Policy. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (p. 367). New York: Oxford University Press.
- Firman, B. Aji, Drs, Sirait, S. Martin, Drs, Perencanaan Dan Evaluasi, Suatu Studi Untuk Proyek Pembangunan, Bumi Aksara, Jakarta, 1982.
- Godin, R. E., Rein, M., & Moran, & M. (2006). The Public and its Policies. In M. Moran, M. Rein, & R. E. Goodin, *The Oxford Handbook of Public Policy* (pp. 3-35). New York: Oxford University Press.
- J.B.Kristiasdi, DR, Perencanaan, LAN RI, Jakarta, 1995.
- Moleong, J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif, P.T.Remaja Rosdakaria, Bandung 1993.
- Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Soasial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1983.
- HAPSARI, Rima Adhi. Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Desa Ngimbrang Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung). *Jurnal Administrasi Publik*, 2021, 11.2.

Kamal, Mustafa; Purwatiningsih, Annisa; Lestari, Asih Widi. Kebijakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. *Reformasi*, 2021, 11.1: 77-85.

Sakti, H.S. (2012). *Perencanaan Pariwisata PerDesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad Ridwan Syah. "Partisipasi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Zona Madina Dompot Dhuafa". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Murniati. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Deskriptif Komulatif tentang Partisipasi Masyarakat Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008

Melalui wawancara via telepon petugas desa wisata..